

**PEMBINGKAIAN BERITA MENGENAI DESAKAN PENERBITAN PERPPU KPK KE PRESIDEN
(ANALISIS *FRAMING* ROBERT N. ENTMAN DI MEDIA *ONLINE* SINDONEWS.COM PERIODE
12 OKTOBER 2019)**

Novian Syahnur Rahim
noviansyahnurr@gmail.com
Ni Gusti Ayu Ketut Kurniasari
Jegegyuke@gmail.com
Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Budi Luhur

ABSTRACT

Online media have the ability to construct and frame an issue into the news according to their respective views. This is because the news in online media is influenced by various interests, such as the interests of media owners. This research discusses the construction carried out by Sindonews.com online media on the pressure of publishing KPK Perppu to the president conducted by students, anti-corruption activist organizations and students who are demonstrating to publish KPK Perppu. This study aims to find out how Sindonews.com frames the news about the pressure to publish the KPK Perppu to the president on October 12, 2019. The theory used is social construction theory using Robert N. Entman's framing analysis model, namely the definition of the problem, estimating the problem or the source of the problem, making moral decisions and emphasizing resolution. The method used is a descriptive qualitative approach. Data collection techniques using secondary data using research literature. The results of this study explain that framing made by Sindonews.com online media, namely: Define Problem: made Sindonews.com is a political problem. Diagnose Causus: Sindonews.com frames in this case the source of the problem is the public/groups that profite the name of the people. Make Moral Judgment Sindonews.com in this case makes moral decisions with the intention that President Joko Widodo does not need to be trapped and must be sure, must also take the right position of the new KPK Law due to the KPK Perppu's pressure which results in Indonesia's democracy becoming bad. And to emphasize the Sindonews.com Treatment Recommendation, namely the Perppu is the president's preogative right, but Sindonews.com places more emphasis on complying with the decision on the results of the revision of the new KPK Law and the president to immediately make a decision to ratify the results of the KPK Law without hesitation.

Key Words: Framing Analysis , Online Media , Perppu Kpk , President , Robert N .Entman

PENDAHULUAN

Media massa pada dasarnya digunakan oleh khalayak untuk mendapatkan suatu informasi berita yang aktual dan terpercaya. Media massa dewasa ini mengalami transformasi ke media *online*. Media *online* merupakan segala jenis media massa yang dipublikasikan melalui internet secara *online*, baik itu segala jenis media cetak maupun media elektronik.

Berita yang diberitakan oleh media massa mempunyai ukuran sebelum dipublikasikan ke publik/khalayak. Dalam hal ini wartawan mempunyai ukuran-ukuran nilai berita yang dipakai untuk memilih peristiwa/berita. Untuk menerbitkan suatu

berita dinyatakan layak untuk dipublikasikan dimedianya salah satunya berita tersebut yakni harus mempunyai nilai dampak bagi publik/khalayak.

Seperti pada pemberitaan mengenai desakan penerbitan perppu KPK yang mengandung nilai berita *impact* (berdampak luas) dan *conflict* (menimbulkan pertentangan). Pemberitaan mengenai desakan penerbitan perppu ini mulai marak diberitakan oleh media massa pada bulan September sampai awal bulan Oktober tak terkecuali media *online* dari Sindonews.com mengenai penerbitan perppu kpk.

Desakan penerbitan perppu bermula karena disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK yang baru hasil revisi dari (Dewan Perwakilan Rakyat) DPR dalam rapat paripurna yang dimulai dari tanggal 5 September sampai dengan dan disahkan pada 17 September 2019.

Hasil revisian UU KPK yang dilakukan oleh DPR ini dalam pemberitaan diberbagai media massa dianggap memperlemah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi menurut para pegiat anti korupsi, mahasiswa, pelajar dari berbagai kampus dan sekolahan untuk menolak undang-undang baru KPK dengan melakukan demonstrasi di beberapa daerah kota di Indonesia.

Tanggal 3 Oktober 2019 diberitakan diberbagai media massa beberapa perwakilan dari mahasiswa datang untuk memberi waktu tenggang agar presiden penerbitan perppu KPK sampai tanggal 14 Oktober 2019. Desakan ini diberitahukan pada saat beberapa perwakilan kampus dari kampus swasta seperti Universitas Trisakti, Ukrida, Universitas Tarumanegara, dan Universitas Paramadina datang ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta bertemu dengan staf kepresidenan Moeldoko pada hari Kamis 3 Oktober.

Desakan dari mahasiswa ini pun menjadi pertimbangan presiden Jokowi untuk mengkalkulasi apakah diperlukannya (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Perppu atau langkah alternatif lainnya. Presiden pun mengundang beberapa tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang ahli dari lintas politik hingga agama.

Seperti yang diutarakan oleh Mahfud MD selaku perwakilan dari 40 tokoh yang dipanggil Jokowi di Istana Merdeka menyatakan: mengatakan pembicaraan mengenai UU KPK dengan Presiden Jokowi menghasilkan tiga opsi. Selain Perppu KPK, ada juga opsi *legislatif review* yang bisa dilakukan parlemen dan *judicial review* yang bisa ditempuh ke Mahkamah Konstitusi.¹

1
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190926161901-32-434346/jokowi-pertimbangkan-perppu-kpk-usai-bertemu-tokoh-di-istana> diakses 15/10/2019 pukul 10:43).

Selang empat hari presiden bertemu dengan para tokoh nasional di Istana Merdeka Jakarta untuk diberikan saran mengenai perppu, selanjutnya pada tanggal 30 September malam para pimpinan partai dari partai pendukung yakni PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, dan PPP bertemu dengan presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, dan dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa menolak penerbitan perppu dan disarankan mencari jalur hukum alternatif lain yaitu *judicial review* (MK) atau *legislatif review* di DPR periode 2019-2024.²

Salah satu media yang memberitakan tentang desakan penerbitan perppu KPK adalah media Sindonews.com. Bila melihat artikel berita yang di *upload* oleh portal Sindonews.com pada tanggal 4-13 Oktober 2019 selama sembilan hari ini, Sindonews.com sudah memberitakan sebanyak 48 berita/ semenjak masa tenggat batas waktu yang diberikan oleh mahasiswa kepada presiden untuk mengambil keputusan mengenai perppu KPK.

Sidonews.com memberitakan mengenai desakan penerbitan perppu KPK, kalau dilihat dari judul pemberitaannya yang dipublikasikan lebih kepada permasalahan pro-kontra dan penyelesaian masalah yang diberitakan oleh Sindonews.com. Dan dari semua pemberitaan tersebut peneliti tertarik memilih berita dari Sindonews.com karena berita dari Sindonews.com ini mendapat respon dari khalayak atau pembacanya untuk membagikan isi berita dari portal Sindonews.com ke media sosial facebook yang jumlah *share* totalnya keseluruhannya mencapai 1.540 *share*/dibagikan ke media sosial facebook terhitung selama 10 hari sejak tanggal 4-13 Oktober 2019, selama masa tenggat waktu desakan yang diberikan oleh mahasiswa. Maka dari pemberitaan Sindonews.com dalam sembilan hari terhitung sejak tanggal 4-13 Oktober 2019 tersebut

2 <https://katadata.co.id/berita/2019/10/01/bertemu-jokowi-di-bogor-parpol-minta-perppu-kpk-jadi-opsi-terakhir> diakses 25/12/2019 pukul 22:01 WIB.

peneliti akan meneliti berita di hari yang jumlah *share*-nya paling tinggi yakni pada tanggal 12 Oktober 2019 yang jumlah *share*-nya paling tinggi yakni 944 *share*/dibagikan ke facebook.

Framing berkaitan dengan bagaimana realitas dibingkai dan disajikan kepada khalayak. *Framing* menyediakan kunci bagaimana peristiwa dipahami oleh media dan ditafsirkan kedalam bentuk berita, karena media melihat peristiwa dari kacamata tertentu maka realitas setelah dilihat oleh khalayak adalah realitas yang sudah terbentuk oleh bingkai media (Eriyanto, 2015: 165-166).

Setiap media memiliki *framing* beritanya masing-masing pada penulisan berita, yang nantinya berpengaruh terhadap arah pemberitaan. Media juga memiliki dampak yang luas bagi setiap pemberitannya, tidak jarang pemberitaan tersebut dapat menggiring opini publik sesuai apa yang di konstruksi oleh media.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis *framing* dari Robert N Entman. Analisis *framing* adalah analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai berita. Juga analisis *framing* secara umum membahas mengenai bagaimana media membentuk konstruksi atas realitas, menyajikannya dan menyampaikannya kepada khalayak.

Penelitian ini peneliti menggunakan analisis *framing* dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Robert N. Entman. Konsepsi *Framing* Robert N. Entman pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan (Eriyanto, 2015: 222).

Dalam pengumpulan data ini, peneliti kumpulkan data primer (data penting). dan data sekunder (data pendukung). Data inilah yang digunakan sebagai bahan penelitian untuk kebutuhan analisis dan mengkaji dalam penelitian ini. Untuk data primer peneliti yaitu data yang diperoleh dari naskah berita pada

Setiap media selalu memiliki caranya tersendiri untuk mengemas berita yang akan di sajikan akan diarahkan kemana pemberitaan ini pada akhirnya patut peneliti untuk menelitinya. Semua realitas yang ada tidak begitu saja disajikan secara apa adanya, melainkan semua itu harus melalui mekanisme yang berlaku dalam proses pembuatan berita di dalam redaksi dari media tersebut.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana media Sindonews.com membingkai pemberitaan mengenai desakan penerbitan perppu KPK ke presiden (Analisis *Framing* Robert N. Entman pada tanggal 12 Oktober 2019)?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Sindonews.com membingkai pemberitaan mengenai desakan penerbitan perppu KPK ke presiden periode 12 Oktober 2019.

situs Sindonews.com. peneliti melakukan observasi pada objek penelitiannya yaitu teks berita terkait berita mengenai desakan penerbitan perppu KPK ke presiden pada media *online* Sindonews.com periode 12 Oktober 2019. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah dan serta artikel yang berasal dari internet untuk mendukung dan memperkuat data primer.

Teknik analisis data yaitu metode yang digunakan peneliti untuk mengetahui konstruksi media dalam membingkai berita.

Menurut Bogdan & Biklen, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2017: 248).

Peneliti menggunakan analisis *framing* Robert N. Entman untuk melakukan penelitian isi dari teks berita desakan penerbitan perppu KPK ke presiden periode 12 Oktober 2019 pada media *online* Sindonews.com dengan menggunakan empat elemen yang ada dalam analisis *framing* Robert N. Entman.

Untuk menganalisis teks berita didalam media Sindonews.com mengenai desakan penerbitan perppu KPK ke presiden, maka dalam hal ini diperlukan metode analisis

framing Robert N. Entman. Entman melihat *framing* dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, atau lebih diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak (Eriyanto, 2015: 221).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keseluruhan penelitian berita yang diberitakan oleh media *online* Sindonews.com pada periode 12 Oktober 2019 yang sudah dianalisis dengan metode analisis *framing* Robert N. Entman. Entman menggunakan empat konsep *framing* dalam menganalisis teks, yaitu *Define Problems: Diagnose Causes: Make Moral Judgement: Treatment Recommendation*.

Framing mengenai berita desakan penerbitan perppu KPK ke presiden Sindonews.com dapat diketahui dengan konsep tersebut yaitu, *Define Problems* (Pendefinisian Masalah): Tiga berita yang dibuat oleh media *online* Sindonews.com yang peneliti analisis, bahwa yang dibuat Sindonews.com adalah sebagai masalah politik, karena dari dua pemberitaan pada berita kesatu dan ketiga media *online* Sindonews.com mengambil narasumber dari para pengamat politik dan untuk berita yang keduanya berjudul (Adhie Massardi: Perppu UU KPK Jadi Presiden Buruk Demokrasi) dalam kasus ini Sindonews.com men-*framing* pada judul berita keranah sistem pemerintahan yang dapat diartikan/dipahami ini menjadi masalah politik.

Diagnose Causes (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah) Sindonews.com membingkai dalam hal ini sumber masalahnya adalah publik/ kelompok yg mencatat nama rakyat. Seperti yang terdapat pada kutipan pemberitaan berikut:

“...hanya karena desakan-desakan kelompok tertentu yang mengatasnamakan kepentingan

rakyat,” tambah Ketua Dewan Pakar Lembaga Aspirasi dan Analisis Strategis (LANDAS) Indonesiaku itu”. (Jokowi Tak Perlu Ragu Sahkan UU KPK karena Sejalan dengan Dasar Fikih. 12 Oktober 2019. Berita 1 Paragraf: 6).

“Hal itu disampaikan menanggapi sejumlah desakan publik agar Presiden mengeluarkan Perppu. Sebab RUU yang disahkan DPR RI melalui rapat paripurna diklaim akan mengganggu jalannya pemberantasan korupsi di Indonesia”. “Perppu tidak ada urgensinya hari ini,” kata Iskandarsyah saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (12/10/2019)”. (Pengamat Sebut Jokowi Tak Perlu Menerbitkan Perppu KPK. Berita 3. Paragraf 2-3).

Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral) Sindonews.com dalam hal ini membuat keputusan moral dengan maksud agar presiden Joko Widodo tidak perlu terjebak dan harus yakin juga harus mengambil posisi yang tepat dari UU KPK yang baru karena desakan perppu KPK yang berakibat demokrasi Indonesia menjadi buruk. Seperti yang terdapat pada kutipan pemberitaan berikut:

Pengamat Politik Hukum, Bambang Saputra mengatakan Jokowi tidak perlu terjebak dengan polemik pro dan kontra UU KPK hasil revisi. Sebab, pembentukan UU tersebut merupakan hasil musyawarah antara pemerintah dengan DPR sebagai wakil rakyat. (Jokowi Tak Perlu Ragu Sahkan UU KPK karena

Sejalan dengan Dasar Fikih. Berita 1 paragraf 2).

"Pandangan semacam itu saya sampaikan bukan tanpa alasan, akan tetapi secara teori politik hukum Islam didasari pada satu kaidah Usul Fikih yang berbunyi, hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula, dan sesuatu yang yakin tidak dapat hilang hanya dengan keraguan," ujar dia dalam keterangan yang diterima", Sabtu (12/10). (Jokowi Tak Perlu Ragu Sahkan UU KPK karena Sejalan dengan Dasar Fikih. Berita 1 Paragraf 3).

"Bambang menilai hukum itu harus merujuk pada keyakinan. Bambang menginginkan Jokowi untuk tetap berpegang pada keyakinannya dan tidak boleh melihat kepada keraguan". (Jokowi Tak Perlu Ragu Sahkan UU KPK karena Sejalan dengan Dasar Fikih. Berita 1 paragraf 4).

"Karena Perppu yang menerabas proses UU yang sudah jadi ini akan menjadi preseden buruk untuk perkembangan demokrasi ke depan," sambungnya lagi.

"Nah karena kalau Perppu kemudian membekukan, menganulir UU yang sudah jadi pada prosesnya sudah sesuai dengan UU, artinya sudah sesuai persetujuan eksekutif dan legislatif, ini bagi demokrasi buruk," tandasnya Adhie.(Adhie Massardi: Perppu UU KPK Jadi Preseden Buruk Demokrasi. Berita 2 paragraf 5&7).

Treatment Recommendation
(Menekankan Penyelesaian) adalah perppu merupakan hak prerogratif presiden. Tetapi Sindonews.com lebih menekankan agar

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dibuat, yang bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan konstruksi media *online* Sindonews.com dalam membongkai berita kasus desakan penerbitan perppu KPK ke presiden pada tanggal 12

mematuhi keputusan hasil dari revisi UU KPK yang baru dan presiden agar segera membuat keputusan untuk mengesahkan hasil UU KPK tanpa ragu. Seperti pada kutipan pemberitaan berikut:

"Atas dasar itu setelah RUU KPK disahkan, maka sekarang Presiden Jokowi tidak boleh ragu-ragu, apalagi menyesal sehingga berwacana akan menerbitkan Perppu tentang KPK ..." (Jokowi Tak Perlu Ragu Sahkan UU KPK karena Sejalan dengan Dasar Fikih. Berita 1 paragraf 6).

"Karena produk undang-undang tersebut sudah jadi dan sudah disahkan DPR, menurut aktivis pergerakan dan pegiat demokrasi itu, maka sebagai negara demokrasi haruslah menaati apa yang sudah diputuskan bersama". (Adhie Massardi: Perppu UU KPK Jadi Preseden Buruk Demokrasi. Berita 2. Paragraf 3).

"Nah kepada UU KPK yang sudah direvisi ini ada nggak prinsip-prinsip demokrasi yang dilanggar sehingga menimbulkan masalah. Kalau tidak ada maka ini harus dilanjutkan," tegasnya. (Adhie Massardi: Perppu UU KPK Jadi Preseden Buruk Demokrasi. Berita 2. Paragraf 4).

"Perppu sah boleh dilakukan presiden, sama dengan Dekrit yang merupakan hak prerogratif presiden. Tapi kapan Dekrit itu dikeluarkan? Berdasarkan suasana subjektif presiden, kalau bangun tidur dia merasa terancam dia dapat mengeluarkan Dekrit, itu benar dan sah secara konstitusional," pungkasnya. (Pengamat Sebut Jokowi Tak Perlu Menerbitkan Perppu KPK . Berita 3. Paragraf 7

Oktober 2019 di media *online* Sindonews.com dengan menggunakan metode *framing* Robert N. Entman, maka dengan ini peneliti akan memberi kesimpulan yang telah didapat dari hasil penelitian.

Media *online* Sindonews.com melakukan pembingkai dengan memandang dan memaknai berita mengenai desakan penerbitan perppu KPK ke presiden ini maka *framing* yang dibuat yaitu: *Define Problem* (Pendefinisian Masalah) yang dibuat Sindonews.com adalah sebagai masalah politik, karena dari dua pemberitaan pada berita kesatu dan ketiga media *online* Sindonews.com mengambil narasumber dari para pengamat politik dan untuk berita yang keduanya dalam kasus ini Sindonews.com men-*framing* pada judul berita keranah sistem pemerintahan yang dapat diartikan ini menjadi masalah politik.

Diagnose Causus (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah) Sindonews.com membingkai dalam hal ini sumber masalahnya adalah publik/ kelompok yg mencatat nama rakyat.

Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral) Sindonews.com dalam hal

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini. Maka dari itu diharapkan untuk penelitian selanjutnya yang dibuat peneliti lain.

Saran Teoritis

1. Untuk mahasiswa yang nanti meneliti tentang *framing*, diharapkan untuk melakukan wawancara kepada media dan wartawan yang membuat berita. Agar hasil penelitiannya tidak hanya hasil dari analisis peneliti tapi juga hasil wawancara dari wartawan serta redaksi berita di media *online* Sindonews.com.
2. Diharapkan untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tentang *framing* media ini, untuk ditambah subjek penelitian dari berbagai media, khususnya kepada pemilik media yang mempunyai partai politik.

Saran Praktis

1. Diharapkan agar khalayak yang membaca berita pada salah satu portal

ini membuat keputusan moral dengan maksud agar presiden Joko Widodo tidak perlu terjebak dan harus yakin juga harus mengambil posisi yang tepat dari UU KPK yang baru karena desakan perppu KPK yang berakibat demokrasi Indonesia menjadi buruk.

Dan terakhir *framing* yang dibuat Sindonews.com dalam menekankan penyelesaian (*Treatment Recommendation*) adalah perppu merupakan hak prerogatif presiden. Tetapi Sindonews.com lebih menekankan agar mematuhi keputusan hasil dari revisi UU KPK yang baru dan presiden agar segera membuat keputusan untuk mengesahkan hasil UU KPK tanpa ragu.

Sidonews.com dalam pemberitaan mengenai desakan penerbitan perppu KPK ke presiden ini, Sindonews.com membingkai beritanya yaitu dengan menolak penerbitan perppu KPK dan mendukung untuk melanjutkan undang-undang KPK baru hasil keputusan pemerintah.

berita terlebih dahulu menyaring informasi tersebut sebelum menerima apa adanya, karena portal berita dalam mengkonstruksi suatu berita pasti memiliki maksud dan tujuan untuk mengarahkan suatu peristiwa, dikarenakan media memiliki ideologinya masing-masing dalam membentuk bingkai suatu berita. dan terkadang berita yang dibuat oleh media memuat kata atau kalimat tertentu yang tujuannya untuk menggiring khalayak agar pesan yang disampaikan sesuai dengan tujuan dan maksudnya.

2. Diharapkan khalayak harus menambahkan bahan bacaan dari berbagai media *online* lainnya agar masyarakat mendapatkan berbagai sudut pandang dalam suatu peristiwa yang dibuat oleh media *online* serta diharapkan khalayak pembaca media *online* bisa membuat keputusan yang tepat bila berita tersebut berpengaruh dalam kedidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Eriyanto. 2015. *Analisis Framing. Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.

Moleong, J. Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Website:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190926161901-32-434346/jokowi-pertimbangkan-perppu-kpk-usai-bertemu-tokoh-di-istana> diakses 15/10/2019 pukul 10:43).

<https://katadata.co.id/berita/2019/10/01/ber-temu-jokowi-di-bogor-parpol-minta-perppu-kpk-jadi-opsi-terakhir> diakses 25/12/2019 pukul 22:01 WIB.